

PERANAN OTONOMI DAERAH DALAM MENDUKUNG PRODUKSI PANGAN DI PROVINSI RIAU

Taryono dan Hendro Ekwarso

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah otonomi daerah di Provinsi Riau dapat meningkatkan produksi pangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi pangan di Provinsi Riau sebelum otonomi daerah untuk komoditi Padi rata-rata tumbuh sebesar 0,87%, komoditi Jagung rata-rata tumbuh 10,26%, Kedelai rata-rata tumbuh negative 13,95%, Kacang Tanah rata-rata tumbuh negative 1,07%, Kacang Hijau rata-rata tumbuh negative 12,05%, Ubi Kayu rata-rata tumbuh sebesar negative 1,89%, Ubi Jalar rata-rata tumbuh negative 6,80%. Diimplementasikannya otonomi daerah telah mempengaruhi kinerja produksi pangan di Provinsi Riau, dimana produksi padi tumbuh 1,72%, Jagung tumbuh negative 0,14%, Kedelai tumbuh 5,31%, Kacang tanah tumbuh negative 6,64%, Kacang Hijau tumbuh negative 0,10%, Ubi Kayu tumbuh negative 3,89%, Ubi Jalar tumbuh negative 2,24%. Berdasarkan Uji t berpasangan menunjukkan bahwa produksi Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar di era otonomi daerah meningkat secara signifikan, sedangkan produksi Padi, Jagung dan Kacang Hijau di era otonomi tidak meningkat secara signifikan. Intensifikasi pertanian lebih ditekankan pada pengembangan Padi, dan Jagung, sedangkan ekstensifikasi lebih ditujukan pada Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Pada Komoditi Kedelai selain dengan ekstensifikasi juga dengan intensifikasi pertanian.

Kata Kunci : Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Produksi.

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya ditujukan untuk kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutu, aman, dan merata dengan harga terjangkau serta berkelanjutan. Dimana kondisi untuk terpenuhinya pangan bagi masyarakat tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Untuk menindaklanjuti ketentuan undang-undang tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang secara eksplisit diatur pada Pasal 7, bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib dan merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pembangunan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat dan kewenangannya berada di tingkat pemerintah daerah.

Ketahanan pangan diwujudkan oleh hasil kerja sistem ekonomi pangan yang terdiri dari subsistem ketersediaan meliputi produksi, pasca panen dan pengolahan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi yang saling berinteraksi secara berkesinambungan. Ketiga subsistem tersebut merupakan satu kesatuan yang didukung oleh adanya berbagai input sumberdaya alam, kelembagaan, budaya, dan teknologi. Proses ini akan hanya akan berjalan dengan efisien oleh adanya partisipasi masyarakat dan fasilitasi pemerintah. Partisipasi masyarakat (petani, nelayan dll) dimulai dari proses produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran serta jasa pelayanan di bidang pangan. Fasilitasi pemerintah diimplementasikan dalam bentuk kebijakan ekonomi makro dan mikro di bidang perdagangan, pelayanan dan pengaturan serta intervensi untuk mendorong terciptanya kemandirian pangan. Output dari pengembangan kemandirian pangan adalah terpenuhinya pangan, SDM berkualitas, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, maka diharapkan peranan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan dapat meningkat secara signifikan. Meningkatnya kebutuhan pangan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Riau yang tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi pangan dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kerawanan pangan di daerah ini. Agar kebutuhan pangan di Provinsi Riau tetap terpenuhi, maka disupply pangan tidak hanya dari hasil produksi di dalam daerah sendiri tetapi juga dari luar daerah.

Menurut Rahman dkk (2004) diperlukan upaya terobosan dalam rangka meningkatkan produksi dan ketersediaan serta menghambat laju ketergantungan impor pangan. Penciptaan teknologi spesifik lokasi melalui dukungan penelitian dan pengembangan diharapkan dapat meningkatkan produksi dan pada gilirannya diharapkan mampu menekan tingkat ketergantungan terhadap impor pangan.

Dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan dan menurunkan tingkat ketergantungan pangan dari luar daerah, maka di Provinsi Riau dikembangkan sentra-sentra produksi pangan yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Selanjutnya dengan kewenangan otonomi daerah yang dimiliki, untuk mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah pemerintah daerah Provinsi Riau mengembangkan program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM). Seyogyanya, kapasitas produksi pangan di daerah di era otonomi semakin meningkat sejalan dengan semakin luasnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi lokal. Namun dalam kenyataanya kegiatan pertanian tanaman pangan yang kurang memberikan sumber pendapatan yang menjanjikan dibandingkan kegiatan perkebunan seperti sawit, hal ini menjadikan ancaman bagi peningkatan kapasitas produksi tanaman pangan di Provinsi Riau.

2. METODE ANALISIS

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dari data Survey Tanaman Pangan Statistik Padi dan Palawija yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau. Selanjutnya untuk mengetahui apakah ada peningkatan kapasitas produksi pangan sebelum dan sesudah otonomi daerah dilakukan uji t dua sampel berpasangan terhadap luas panen, produktifitas, dan produksi tanaman pangan yang meliputi padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Sebagai batasan untuk tahun sebelum otonomi daerah dimulai dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1999 dan pada otonomi daerah mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2008. Hipotesis :

$H_0 : D = 0 \rightarrow$ Kedua rata-rata populasi adalah identik (rata-rata populasi luas panen, produktifitas, dan produksi tanaman pangan sebelum dan sesudah otonomi adalah sama atau tidak berbeda secara nyata)

$H_1 : D \neq 0 \rightarrow$ Kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (rata-rata populasi luas panen, produktifitas, dan produksi tanaman pangan sebelum dan sesudah otonomi adalah berbeda secara nyata)

Dasar pengambilan keputusan :

Jika statistik hitung (t_{stat}) > statistik tabel ($t_{Critical one-tail}$), maka H_0 ditolak dan

Jika statistik hitung (t_{stat}) < statistik tabel ($t_{Critical one-tail}$), maka H_0 diterima.

Selain itu, pengambilan keputusan juga dilihat berdasarkan nilai probabilitas dengan ketentuan Jika nilai probabilitas > 0,05 maka H_0 diterima (tidak signifikan) dan Jika nilai probabilitas < 0,05 maka H_0 , ditolak (Signifikan). Dalam penelitian ini, perhitungan t hitung dan t tabel serta probabilitas menggunakan menu data analysis yang telah tersedia dalam Microsoft Excel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk guna memperoleh pendapatan yang layak agar akses terhadap pangan merupakan dua komponen utama dalam perwujudan ketahanan pangan (Suryana, 2001 dan Suryana 2002). Pertumbuhan penduduk Provinsi Riau di era otonomi daerah yang cukup tinggi yaitu rata-rata 4,46% (periode tahun 2000-2008) harus diimbangi ketersediaan pangan yang cukup bagi penduduknya. Persoalan distribusi pangan nasional

Ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan suatu wilayah. Rata-rata pertumbuhan komoditi pangan yang paling tinggi sebelum otonomi daerah adalah komoditi Jagung. Komoditi ini mengalami pertumbuhan produksi rata-rata sebesar 10,26% sebelum otonomi daerah. Pada otonomidaerah rata-rata pertumbuhan komoditi pangan yang paling tinggi adalah komoditi kedelai. Komoditi ini mengalami pertumbuhan produksi rata-rata sebesar 5,31%. Sedangkan komoditi yang rata-rata pertumbuhannya paling rendah sebelum otonomi daerah adalah komoditi Kedelai, dimana sebelum otonomi daerah Kedelai mengalami pertumbuhan produksi rata-rata yang negatif 13,95%. Sedangkan pada otonomidaerah rata-rata pertumbuhan komoditi pangan yang paling rendah adalah Kacang Tanah. Pertumbuhan produksi Kacang Tanah rata-rata setiap tahunnya tumbuh negatif sebesar 6,64%.

Dalam rangka diversifikasi pangan akan sangat baik bila pangan lokal dikembangkan kembali dan diupayakan dibangkitkan dari potensi lokal sehingga mengurangi ketergantungan pada beras. Fortifikasi pangan atas pangan lokal dapat dikenalkan teknologinya sehingga masyarakat dapat mengakses peluang usaha produktif baru dan dapat dikembangkan sebagai sumber income keluarga (agroindustri pedesaan). Namun yang perlu diingat adalah bahwa kegiatan produksi ini harus bersifat *market driven* dan mendasarkan pada preferensi konsumen. (Ibrahim, dkk : 2009)

Tabel : Luas Panen, Produktifitas per Ha, dan Produksi Padi di Provinsi Riau dari tahun 1991-2008

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)
1991	146.121	29,48	430.835
1992	165.553	28,62	473.732
1993	146.133	29,86	436.297
1994	146.177	30,47	445.361
1995	152.204	30,14	458.756
1996	150.354	30,72	461.905
1997	137.953	30,16	416.135
1998	126.280	29,31	370.124
1999	155.683	29,65	461.630
2000	141.640	30,45	431.351
2001	132.507	31,20	413.391
2002	129.025	30,74	396.644
2003	132.887	31,17	414.237
2004	145.239	31,27	454.186
2005	134.418	31,55	424.095
2006	136.177	31,53	429.380
2007	147.167	33,30	490.087
2008	147.796	33,44	494.260

Sebelum otonomi daerah (1991-1999) luas panen padi di Provinsi Riau rata-rata setiap tahun tumbuh sebesar 0,8% pada otonomidaerah (2000-2008) rata-rata luas panen padi setiap tahunnya tumbuh menjadi sebesar 0,5%. Semakin terbatasnya lahan pertanian yang digunakan untuk berbagai aktifitas ekonomi dan kegiatan penduduk lainnya, maka usaha peningkatan produktivitas padi lebih diupayakan melalui intensifikasi pertanian. Sebelum otonomi daerah di Provinsi Riau produktivitas padi tertinggi terjadi pada tahun 1994 yaitu 30,47 Ku/Ha. Sedangkan pada era otonomi daerah ini produktivitas padi dapat ditingkatkan menjadi 33,44 Ku/Ha. Sehingga produksi padi di Provinsi Riau dapat terus ditingkatkan, dimana sebelum otonomi produksi padi tertinggi terjadi pada tahun 1992 dengan produksi 473.732 ton sedangkan pada otonomipada tahun 2008 produksi padi dapat terus ditingkatkan menjadi 494.260 ton.

Tabel : Luas Panen, Produktifitas per Ha, dan Produksi Jagung di Provinsi Riau dari tahun 1991-2008

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)
1991	13.731	18,78	25.784
1992	12.547	20,71	25.982
1993	10.223	21,23	21.699
1994	15.484	21,49	33.274
1995	10.158	21,12	21.455
1996	17.953	21,64	38.853
1997	16.320	21,60	35.253
1998	19.261	21,51	41.433
1999	25.890	21,75	56.317
2000	22.253	21,79	48.493
2001	18.349	21,75	39.915
2002	17.790	21,69	38.588
2003	14.581	21,70	31.635
2004	19.285	21,84	42.122
2005	16.524	22,04	36.421
2006	15.539	22,35	34.728
2007	18.379	21,99	40.410
2008	21.397	22,41	47.959

Selain padi, jagung merupakan sumber pangan yang dihasilkan di Provinsi Riau. Sebelum otonomi daerah rata-rata luas panen jagung setiap tahunnya seluas 15.730 Ha, pada otonomirata-rata luas panen jagung meningkat menjadi 18.233 Ha dengan rata-rata produksi sebelum otonomi setiap tahunnya 33.339 ton meningkat menjadi 40.030 ton pada otonomidaerah. Ketersediaan sumber-sumber produksi pangan domestik yang terus meningkat merupakan salah satu indikator bagi kemandirian pangan di daerah. Simatupang (2001) mengungkapkan bahwa kemandirian pangan merupakan salah satu dimensi pengukuran ketahanan pangan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketahanan pangan dari sisi kemandirian antara lain (1) ketergantungan ketersediaan pangan nasional pada produksi pangan domestik, (2) ketergantungan ketersediaan pangan nasional pada pangan impor dan atau net impor (impor dikurangi ekspor), dan (3) ketergantungan ketersediaan pangan terhadap transfer pangan dari pihak atau negara lain.

Tabel : Luas Panen, Produktifitas per Ha, dan Produksi Kedelai di Provinsi Riau dari Tahun 1991-2008

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)
1991	14.344	8,80	12.622
1992	12.414	8,89	11.037
1993	11.122	10,06	11.186
1994	11.840	10,15	12.019
1995	7.332	9,41	6.897
1996	8.087	9,56	7.730
1997	7.461	9,59	7.156
1998	4.906	9,84	4.827
1999	3.960	9,58	3.795
2000	3.110	9,97	3.100
2001	2.006	11,41	2.289
2002	2.296	10,05	2.307
2003	1.423	10,11	1.438
2004	1.871	10,25	1.825
2005	2.829	10,33	2.923
2006	3.994	10,53	4.205
2007	2.266	10,68	2.419
2008	4.319	10,86	4.689

Produksi kedelai di Provinsi Riau terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 1991 produksi kedelai mencapai 12.622 ton dan pada tahun 2008 produksinya turun menjadi 4.689 ton. Penurunan produksi kedelai tersebut sebanding dengan penurunan luas panen kedelai. Pada tahun 1991 luas panen kedelai seluas 14.344 Ha dan pada tahun 2008 luas panen kedelai turun menjadi 4.319 Ha. Terus menurunnya produksi kedelai tersebut tentunya dapat mempengaruhi kemandirian pangan di Provinsi Riau. Kemandirian pangan terhadap produksi domestik menunjukkan seberapa besar produksi pangan (atau komoditas tertentu) menyumbang atau dapat memenuhi ketersediaan pangan nasional. Ketersediaan pangan nasional didefinisikan sebagai penjumlahan antara produksi domestik (bersih, setelah dikurangi untuk penggunaan bibit dan tercecer) dengan impor dan stok. Kemandirian pangan juga dapat diukur dengan menelaah ketergantungannya terhadap impor maupun net-impor. Untuk ini dihitung rasio impor dan atau net-impor terhadap ketersediaan pangan nasional maupun terhadap ketersediaan pangan siap konsumsi (Rachman dkk, 2004).

Tabel : Luas Panen, Produktifitas per Ha, dan Produksi Kacang Tanah di Provinsi Riau dari tahun 1991-2008

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)
1991	4.462	9,99	4.458
1992	4.294	10,37	4.455
1993	3.656	10,39	3.799
1994	5.030	9,06	4.556
1995	4.579	9,51	4.354
1996	4.127	9,26	3.820
1997	3.246	9,69	3.144
1998	4.656	9,38	4.366
1999	4.737	8,63	4.089
2000	4.159	9,33	3.882
2001	3.482	9,13	3.180
2002	4.493	9,22	4.142
2003	3.642	9,23	3.362
2004	3.554	9,42	3.349
2005	3.749	9,41	3.526
2006	3.619	9,36	3.387
2007	3.475	9,28	3.225
2008	2.412	9,29	2.240

Luas panen kacang tanah di Provinsi Riau setiap tahunnya relative berfluktuatif. Sebelum otonomi daerah (1991-1999) luas panen kacang terluas terjadi pada tahun 1999 seluas 4.737 Ha sedangkan pada otonomidaerah (2000-2008) luas panen kacang terluas terjadi pada tahun 2002 yaitu seluas 4.493 Ha dengan kecenderungan luas panen dan produksinya yang relatif menurun.

Dalam rangka diversifikasi pangan akan sangat baik bila pangan lokal dikembangkan kembali dan diupayakan dibangkitkan dari potensi lokal sehingga mengurangi ketergantungan pada beras. Fortifikasi pangan atas pangan lokal dapat dikenalkan teknologinya sehingga masyarakat dapat mengakses peluang usaha produktif baru dan dapat dikembangkan sebagai sumber income keluarga (agroindustri pedesaan). Namun yang perlu diingat adalah bahwa kegiatan produksi ini harus bersifat *market driven* dan mendasarkan pada preferensi konsumen (Ibrahim, dkk : 2009).

Tabel : Luas Panen, Produktifitas per Ha, dan Produksi Kacang Hijau di Provinsi Riau dari tahun 1991-2008

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)
1991	3.100	13,13	4.071
1992	2.960	8,57	2.537
1993	1.891	8,56	1.618
1994	2.367	10,16	2.405
1995	1.607	10,47	1.682
1996	1.155	9,85	1.138
1997	1.226	9,71	1.191
1998	1.624	9,88	1.604
1999	1.464	9,96	1.458
2000	1.642	10,36	1.701
2001	1.301	10,03	1.305
2002	1.573	10,06	1.582
2003	1.931	10,07	1.945
2004	1.158	10,10	1.170
2006	1.886	10,34	1.950
2006	2.194	10,53	2.311
2007	1.650	10,54	1.739
2008	1.577	10,70	1.688

Luas panen dan produksi kacang hijau di Provinsi Riau memiliki trend yang terus menurun, namun demikian produktivitasnya relative meningkat. Sebelum otonomi daerah pada tahun 1991 luas panen Kacang Hijau di Provinsi Riau seluas 3.100 Ha dan pada tahun 1999 luas panen Kacang Hijau turun menjadi 1.464 Ha. Pada awal pelaksanaan otonomi daerah luas panen Kacang Hijau, pada tahun 2000 seluas 1.642 Ha dan pada tahun 2008 turun menjadi seluas 1.577 Ha. Penurunan luas panen tersebut berbanding lurus dengan penurunan produksi Kacang Hijau di Provinsi Riau. Sebelum otonomi daerah pada tahun 1991 tingkat produksi Kacang Hijau di Provinsi Riau yaitu 4.071 ton dan pada tahun 1999 tingkat produksi Kacang Hijau turun menjadi 1.458 ton. Pada awal pelaksanaan otonomi daerah, produksi kacang hijau di Provinsi Riau di tahun 2000 mampu mencapai 1.701 ton dan pada tahun 2008 produksinya turun menjadi 1.688 ton.

Tabel : Luas Panen, Produktifitas per Ha, dan Produksi Ubi Kayu di Provinsi Riau dari tahun 1991-2008

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)
1991	8.466	113,00	96.059
1992	9.534	117,00	111.605
1993	7.275	112,00	81.593
1994	7.745	102,00	78.885
1995	5.717	105,00	60.015
1996	6.167	103,00	63.254
1997	6.154	104,00	64.151
1998	6.941	104,00	71.892
1999	7.724	107,00	82.437
2000	6.665	105,00	69.722
2001	5.077	110,00	55.822
2002	5.328	106,00	56.547
2003	4.850	106,00	51.488
2004	4.445	108,00	47.922
2005	3.891	107,00	41.668
2006	4.410	108,00	47.586
2007	4.718	110,00	51.784
2008	4.625	110,00	50.772

Sebelum otonomi daerah (1991-1999) luas panen ubi kayu di Provinsi Riau menunjukkan trend yang menurun. Luas panen ubi kayu tahun 1991 yaitu 8.466 Ha dan tahun 1999 luasnya turun menjadi 7.724 Ha atau rata-rata setiap tahun pertumbuhan luas panen Ubi Kayu di Provinsi Riau sebelum otonomi daerah negatif 1,14%. Pada otonomi daerah saat ini luas panen Ubi Kayu terus menunjukkan penurunan luasnya, dimana pada tahun 2000 luas panennya seluas 6.665 Ha ditahun 2008 turun menjadi 4.625 Ha. Tingkat laju penurunan luas panen Ubi Kayu di era otonomi (-4,46%) lebih tinggi dibandingkan laju penurunan luas panen Ubi Kayu sebelum otonomi daerah. Penurunan luas panen mengakibatkan tingkat produksi Ubi Kayu di Provinsi Riau juga menurun. Sebelum otonomi daerah (1991-1999) tingkat produksi Ubi Kayu di tahun 1991 sebesar 96.059 Ton dan tahun 1999 turun menjadi 82.437 ton atau pertumbuhannya negatif 1,89%. Pada pelaksanaan otonomi daerah, ditahun 2000 produksinya menjadi 69.722 ton dan di tahun 2008 turun menjadi 50.772 ton atau tumbuh negatif 3,89%.

Meskipun upaya peningkatan produksi pangan di dalam negeri saat ini terus dilakukan, namun laju peningkatannya masih belum mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri karena produktivitas tanaman pangan serta peningkatan luas areal yang stagnan bahkan cenderung menurun. (Hutapea dan Mashar : 2009)

Produksi bahan pangan terutama bahan makanan pokok mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia yang pertama (primer) adalah makanan, pakaian dan rumah (R. Bintarto, 1979), oleh karena itu bahan makanan pokok di suatu daerah adalah sangat perlu untuk perencanaan peningkatan produksi bahan pangan selanjutnya. Peningkatan produksi bahan pangan khususnya bahan makanan pokok merupakan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan tersebut.

Tabel : Luas Panen, Produktifitas per Ha, dan Produksi Ubi Jalar di Provinsi Riau dari tahun 1991-2008

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)
1991	2.251	81,00	18.151
1992	2.581	82,00	21.158
1993	1.896	70,00	13.264
1994	2.182	72,00	15.620
1995	1.684	79,00	13.273
1996	1.442	78,00	11.296
1997	1.597	78,00	12.473
1998	1.617	78,00	12.540
1999	1.317	78,00	10.329
2000	1.738	78,00	13.577
2001	1.449	78,00	11.254
2002	1.179	78,00	9.178
2003	1.446	78,00	11.299
2004	1.460	78,00	11.390
2005	1.375	79,00	10.848
2006	1.413	79,00	11.123
2007	1.627	79,00	12.814
2008	1.429	79,00	11.330

Penurunan luas panen tanaman pangan juga terjadi pada tanaman Ubi Jalar. Sebelum otonomi daerah luas panen ubi jalar di tahun 1991 seluas 2.251 Ha dan ditahun 1999 turun menjadi 1.317 Ha atau rata-rata pertumbuhannya setiap tahun negative 6,48%. Pada otonomi daerah walaupun pada tahun 2000 terjadi peningkatan luas panen menjadi 1.738 Ha, namun demikian luas panen pada tahun-tahun berikutnya memiliki kecendrungan menurun dan pada tahun 2008 menjadi seluas 1.429 Ha. Demikian juga dari sisi produksi Ubi Jalar terus menunjukkan penurunan. Sebelum otonomi daerah rata-rata penurunan produksinya setiap tahun sebesar 6,80% dengan tingkat produksi pada tahun 1991 sebesar 18.151 ton dan turun menjadi 10.329 ton tahun 1999. Pada otonomi daerah penurunan produksi Ubi Jalar rata-rata setiap tahunnya relative lebih rendah (2,24%) dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. Pada tahun 2000 produksi Ubi Jalar di Provinsi Riau sebesar 13.577 ton dan turun menjadi sebesar 11.330 pada tahun 2008.

Ketersediaan pangan mengisyaratkan adanya rata-rata pasokan pangan yang cukup tersedia setiap saat. faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan antara lain (Nuhfil: 2009) :

1. Produksi : peningkatan produksi pangan dan kualitas pangan dapat dilakukan dengan program intensifikasi budidaya dan diversifikasi pangan antara lain dengan usaha pengolahan bahan pangan menjadi produk pangan yang mempunyai nilai tambah.
2. Pasokan pangan dari luar (impor)
3. Cadangan pangan merupakan salah satu sumber penyediaan pangan penting bagi pemantapan ketahanan pangan. Pengelolaan cadangan yang baik akan dapat menanggulangi masalah pangan seperti adanya gejolak harga yang tidak wajar, atau keadaan darurat karena adanya bencana atau paceklik yang berkepanjangan, sehingga membatasi aksesibilitas pangan masyarakat.
4. Bantuan pangan
5. Jumlah penduduk

Selanjutnya untuk mengetahui apakah dengan adanya otonomi daerah mampu meningkatkan luas panen, tingkat produktivitas dan produksi tanaman pangan, dilakukan uji t berpasangan dengan hasil uji sebagai berikut :

Tabel : Hasil Uji t Dua Sampel Berpasangan (Paired Sample t Test) dan Probabilitas Tanaman Pangan di Provinsi Riau.

Keterangan	Luas Panen	Produktifitas Per Ha	Produksi
PADI			
t Stat	1,8302	-4,1390	0,0442
t Critical one-tail	1,8595	1,8595	1,8595
P(T<=t) one-tail	0,0523	0,0016	0,4829
Keputusan	Ho Diterima	Ho Ditolak	Ho Diterima
JAGUNG			
t Stat	-1,4491	-3,0620	-1,7127
t Critical one-tail	1,8595	1,8595	1,8595
P(T<=t) one-tail	0,0927	0,0078	0,0626
Keputusan	Ho Diterima	Ho Ditolak	Ho Diterima
KEDELAI			
t Stat	4,7054	-3,6633	4,4664
t Critical one-tail	1,8595	1,8595	1,8595
P(T<=t) one-tail	0,0008	0,0032	0,0010
Keputusan	Ho Ditolak	Ho Ditolak	Ho Ditolak
KACANG TANAH			
t Stat	2,1735	1,3758	3,0619
t Critical one-tail	1,8595	1,8595	1,8595
P(T<=t) one-tail	0,0307	0,1031	0,0078
Keputusan	Ho Ditolak	Ho Diterima	Ho Ditolak
KACANG HIJAU			
t Stat	0,9420	-0,6276	0,7269
t Critical one-tail	1,8595	1,8595	1,8595
P(T<=t) one-tail	0,1869	0,2739	0,2440
Keputusan	Ho Diterima	Ho Diterima	Ho Diterima
UBI KAYU			
t Stat	7,5891	-0,1789	6,2888
t Critical one-tail	1,8595	1,8595	1,8595
P(T<=t) one-tail	0,0000	0,4312	0,0001
Keputusan	Ho Ditolak	Ho Diterima	Ho Ditolak
UBI JALAR			
t Stat	2,7714	-0,8647	2,5141
t Critical one-tail	1,8595	1,8595	1,8595
P(T<=t) one-tail	0,0121	0,2062	0,0181
Keputusan	Ho Ditolak	Ho Diterima	Ho Ditolak

Dalam upaya meningkatkan produksi tanaman pangan dapat dilakukan melalui usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi merupakan upaya untuk meningkatkan produksi pangan tanpa menambah luas lahan tanaman pangan, sedangkan ekstensifikasi sebaliknya dalam meningkatkan produksi pangan upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan luas lahan tanaman pangan.

Usaha intensifikasi pertanian tanaman pangan pada era otonomi daerah di Provinsi Riau lebih diarahkan pada tanaman padi dan jagung. Hal ini dapat dilihat dari nilai $P(T \leq t)$ one-tail untuk luas panen 0,0523 dan produksi 0,4829 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, baik luas panen maupun produksi padi dengan diberlakukannya otonomi daerah tidak terjadi peningkatan secara signifikan. Namun demikian produktifitas lahan tanaman padi per hektarnya meningkat secara signifikan ($P=0,0016 < 0,05$). Demikian juga dengan tanaman jagung, baik luas lahan ($P=0,0927$) maupun produksinya ($P=0,0626$) tidak terjadi peningkatan. Sedangkan produktifitas lahan jagung per hektarnya meningkat signifikan ($P=0,0078 < 0,05$). Sebaliknya pada tanaman kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar lebih dikembangkan melalui usaha ekstensifikasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas untuk tanaman kacang ($P=0,0307$), ubi kayu ($P=0,0000$) dan ubi jalar ($P=0,0121$) yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti terjadi peningkatan luas panen dengan adanya otonomi daerah secara signifikan. Peningkatan luas panen tersebut turut mendorong meningkatnya produksi kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Namun demikian, peningkatan luas panen dan produksi tersebut tidak diikuti oleh peningkatan produktifitas lahan perhektarnya.

Perlakuan berbeda terjadi pada komoditi tanaman kedelai, selain melalui intensifikasi untuk meningkatkan produksi juga dilakukan melalui ekstensifikasi. Baik luas panen, produktifitas dan produksi dengan adanya otonomi daerah meningkat secara signifikan (lihat nilai probabilitas untuk luas panen, produktivitas dan produksi kedelai yang lebih kecil dari 0,05). Sementara itu, probabilitas produksi, luas panen dan produktivitas kacang hijau yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa dengan adanya otonomi daerah baik produksi, luas panen maupun produktivitas kacang hijau tidak meningkat secara signifikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pertumbuhan produksi pangan di Provinsi sebagian besar (Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Jalar, dan Ubi kayu) dengan diimplementasikannya otonomi daerah rata-rata pertumbuhannya negatif. Sedangkan komoditi Padi dan Kedelai pertumbuhan produksinya di era otonomi daerah menunjukkan peningkatan (positif).
2. Berdasarkan Uji t berpasangan menunjukkan bahwa produksi Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar di era otonomi daerah meningkat secara signifikan, sedangkan produksi Padi, Jagung dan Kacang Hijau di era otonomi tidak meningkat secara signifikan. Intensifikasi pertanian lebih ditekankan pada pengembangan Padi, dan Jagung, sedangkan ekstensifikasi lebih ditujukan pada Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Pada Komoditi Kedelai selain dengan ekstensifikasi juga dengan intensifikasi pertanian.

Saran

1. Peningkatan kapasitas produksi pangan di Provinsi Riau harus dikembangkan secara berkelanjutan (minimum setara dengan laju pertumbuhan penduduk) melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi. Ekstensifikasi lahan pertanian ditujukan untuk memperluas lahan produksi pertanian, sehingga produksi pangan secara nasional yang sekarang dapat ditingkatkan. Intensifikasi ditujukan pada lahan-lahan pertanian subur dan produktif yang sudah merupakan daerah lumbung pangan.
2. Kebijakan dalam bidang pangan perlu ditelaah dan dikaji kembali khususnya yang mendorong tercapainya ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan. Keberadaan, peran dan fungsi lembaga pangan seperti kelompok tani, UKM, Koperasi perlu direvitalisasi dan restrukturisasi untuk mendukung pembangunan kemandirian pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachman, HPS, dkk. 2004. Prospek Ketahanan Pangan Nasional (Analisis dari Aspek Kemandirian Pangan). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Simatupang, P. 2001. Food Security: Basic Concepts and Measurement in Food Security in Southwest Pacific Island Countries. CGPRT Center Works Towards Enhancing Sustainable Agriculture and Reducing Poverty in Asia and The Pacific
- Suryana, A. 2001. Tantangan dan Kebijakan Ketahanan Pangan. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk mencapai ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi. Departemen Pertanian, Jakarta, 29 Maret 2001.
- Suryana, A. 2002. Perspektif dan Upaya Pemantapan Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian. Makalah pada Lokakarya Tekanan Penduduk Degradasi Lingkungan dan Ketahanan Pangan. 1 Mei 2002. IPB Bogor.
- Hutapea J dan Mashar A Z. 2009. Ketahanan Pangan dan Teknologi Produktivitas Menuju Kemandirian Pertanian Indonesia. Birokrat Surabaya.
- Nuhfil Hanani AR. 2009. ketahanan pangan lecture.brawijaya.ac.id/nuhfil/.../2-pengertian-ketahanan-pangan-2.pdf*
- Ibrahim, dkk. 2009. Analisis Ketahanan Pangan di Jawa Timur (The Food Security Analysis in East Java). Disampaikan pada Workshop II Ketahanan Pangan Di Wilayah Jawa Timur Universitas Muhammadiyah Malang, 11 Juni 2009.

Geografi.ums.ac.id/ebook/perenc_kota/sumber/TUGAS1.doc